

## ANALISIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKAD) KABUPATEN LAHAT

**Restu Inayah**

Mahasiswa Universitas Sriwijaya  
restuinayah@yahoo.com

**Arista Hakiki**

Universitas Sriwijaya  
aristahakiki@unsri.ac.id

**Relasari**

Universitas Sriwijaya  
relasari@unsri.ac.id

### **ABSTRACT**

*This research discussed about the analysis of regional management information system (SIMDA) for finance at Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) of Lahat Regency. Data Analysis method used in this research was the qualitative descriptive with the system approach a decipherment from an information system, which is accrual based SIMDA for Finance into part of the components (with the purpose) to identify and evaluate problems, chances, obstacles, and needs thus recommendation can be suggested. The result of the research showed that there are excellences, limitations, and internal controls on the regional management information system (SIMDA) for finance at Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) of Lahat Regency.*

**Keywords:** Accounting Information System, SIMDA for Finance, Government Accounting Standards

### **PENDAHULUAN**

Akuntansi merupakan alat komunikasi bagi setiap jenis entitas. Akuntansi merupakan proses pencatatan, pengelompokan, perangkuman dan pelaporan dari setiap kegiatan transaksi. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memproses data yang terdiri dari pelaku, serangkaian prosedur dan teknologi informasi yang saling

berelasi dan bertanggungjawab untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi yang didapat dari transaksi data.

Kegiatan akuntansi bertujuan untuk menerbitkan laporan keuangan. Organisasi sektor publik khususnya organisasi pemerintahan merupakan entitas yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada publik. Dalam mewujudkan suatu sistem tata pemerintahan yang

baik (*good governance*), diperlukan perubahan dibidang akuntansi pemerintahan. Perubahan dibidang akuntansi harus didasari dengan suatu dasar yang kuat yaitu dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Organisasi sektor publik khususnya organisasi pemerintahan merupakan entitas yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada publik. Pemerintah adalah sebuah organisasi sektor publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan pembangunan di suatu daerah (Handayani, 2010). Organisasi sektor publik yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat juga harus dapat menyediakan sistem informasi yang bersifat interaktif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Tujuan dari pelaporan keuangan sektor publik adalah (Bastian, 2010: 297) menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam membiayai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya, menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan yang terjadi, dan menyediakan informasi secara keseluruhan yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas meliputi biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (diganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004), yang menyebutkan

bahwa setiap daerah mendapat kewenangan mengatur pemerintahan sendiri termasuk keuangan daerah. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia menerapkan reformasi dalam pengelolaan keuangan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 dan UU No 15 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

Pemerintah memerlukan perubahan dalam bidang akuntansi pemerintahan dalam mewujudkan suatu sistem tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Perubahan tersebut harus didasari dengan suatu dasar yang kuat yaitu dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pemerintah menerbitkan PP No.71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan pemerintahan yang wajib untuk menyajikan laporan keuangan daerah yang lebih akuntabel, tertib, transparan.

Peraturan ini menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap Daerah Otonom Kabupaten/Kota maupun Provinsi dalam menyajikan laporan keuangan berbasis akrual pada pemerintah daerahnya. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lahat sebagai pengguna anggaran juga wajib membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai PP No.71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah dan Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah.

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah menerapkan SAP berbasis akrual dengan merevisi PP No.24 Tahun 2005 menjadi PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, membawa beberapa perubahan dalam standar dan mekanisme penyajian laporan keuangan di pemerintah, serta didukung dengan penerapan Permendagri No.64 Tahun 2013 Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Pemerintah Kabupaten Lahat mematuhi Permendagri No. 64 Tahun 2013 Pasal 10 ayat (2) tersebut dengan menerapkan SAP berbasis akrual terhitung sejak Januari 2015.

Perkembangan teknologi informasi komunikasi yang semakin pesat telah mempengaruhi sistem pengolahan data dan sistem informasi pada entitas yang melakukan pelaporan data keuangan. Untuk dapat melakukan pengolahan data keuangan secara efektif dan efisien maka dibutuhkan suatu sistem informasi terintegrasi yang dapat diandalkan, cepat dan akurat sehingga suatu sistem dapat terintegrasi secara menyeluruh dan mampu memberikan informasi yang handal dan relevan.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas dan memberi perubahan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih serta sesuai amanat PP 60 tahun 2008 pasal 59 ayat (2) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SSIP) dan Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, maka BPKP dalam hal ini Deputi

Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, memandang perlu untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Dengan demikian maka pemerintah daerah yang merupakan entitas pelaporan dapat menyajikan Laporan Keuangan secara wajar, transparan dan akuntabel.

BPKP telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berbasis akrual. Aplikasi SIMDA berbasis akrual merupakan program aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi yang nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan dalam berbagai hal di sektor pemerintahan. Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) berbasis akrual digunakan sebagai alat untuk mengontrol berbagai aktifitas yang terjadi pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sebagai bahan untuk membuat laporan keuangan.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Lahat merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang telah menerapkan SIMDA keuangan berbasis akrual sebagai sistem informasi pengelola keuangan dan sistem informasi pelaporan keuangan. Dinas PPKAD Kabupaten Lahat menerapkan SIMDA Keuangan berbasis akrual sejak Januari 2015 dan diterapkan pada tiga bagian yakni bagian anggaran, bagian perbendaharaan, bagian akuntansi dan pelaporan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Keagenan

Dalam teori keagenan menjelaskan bahwa konsep *corporate governance* dapat dipahami dengan menggunakan dasar perspektif hubungan keagenan. Hubungan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai *principal* yang memberikan wewenang kepada agen untuk mengelola dana dan memberikan pelayanan publik yang layak bagi masyarakat.

Hubungan rakyat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat (*principal*) yang menggunakan pemerintah (*agent*), untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepada pemerintah melalui mekanisme pelaporan keuangan secara periodik. Kewajiban untuk membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara berkala merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat yang dalam hal ini diwakili oleh DPRD. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 bahwa paling lambat 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, pejabat pengelola keuangan daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada DPRD berdasarkan LKPD yang telah diaudit oleh BPK.

### Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:3) dalam bukunya yang berjudul "Teori Akuntansi" adalah sebagai berikut: Akuntansi adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi

keuangan terutama dalam jumlah kekayaan, utang, dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada waktu (periode tertentu).

### Sistem Informasi Berbasis Komputer

Pengertian akuntansi menurut Sofyan Syafri Harahap (2011:3) dalam bukunya yang berjudul "Teori Akuntansi" adalah sebagai berikut : Akuntansi adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan terutama dalam jumlah kekayaan, utang, dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada waktu (periode tertentu).

### Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memproses data yang terdiri dari pelaku, serangkaian prosedur dan teknologi informasi yang saling berelasi dan bertanggungjawab untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi yang didapatkan dari transaksi data.

### Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. "Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah". Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah.

## **Sistem Informasi Manajemen Daerah**

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang lebih dikenal SIMDA merupakan salah satu

produk dari teknologi sistem informasi yang digunakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerahnya.

## **METODE PENELITIAN**

### **Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini membahas SIMDA keuangan berbasis akrual yang diterapkan pada tiga bagian yaitu bagian anggaran, bagian perbendaharaan, bagian akuntansi dan pelaporan di Dinas PPKAD Kabupaten Lahat.

### **Tempat Penelitian**

Penelitian ini bertempat di Dinas PPKAD yang beralamat di Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Lahat Jl. Kolonel H. Barlian Bandar Jaya Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.

### **Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis data dan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **Jenis Data**

Data yang didapatkan dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Data kualitatif berupa pernyataan yang didapat langsung dari hasil wawancara dengan kepala bagian anggaran, kepala bagian perbendaharaan, kepala bagian akuntansi, beserta staff dan dokumentasi mengenai SIMDA keuangan berbasis akrual yang diterapkan di Dinas PPKAD Kabupaten Lahat.

### **Sumber Data**

Sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data dari hasil wawancara, dokumentasi yang didapat dari pihak Dinas PPKAD Kabupaten Lahat, yakni kepala Dinas, kepala bagian anggaran, kepala bagian perbendaharaan, kepala bagian akuntansi beserta staff mengenai SIMDA keuangan berbasis akrual yang diterapkan di Dinas PPKAD yang diterapkan sejak Januari 2015. Sedangkan data sekunder di dapatkan dari media elektronik dan publikasi dari pihak lain mengenai SIMDA Keuangan berbasis akrual.

### **Metode Pengumpulan Data**

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan interaksi dan komunikasi untuk memperoleh informasi kepada responden pada dinas PPKAD Kabupaten Lahat yang berkaitan dengan penerapan SIMDA Keuangan berbasis akrual.
2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mendokumentasikan informasi yang berhubungan dengan penerapan SIMDA Keuangan berbasis akrual pada Dinas PPKAD Kabupaten Lahat.

### **Teknik Analisis**

Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan sistem yang merupakan penguraian dari suatu sistem informasi yaitu SIMDA Keuangan berbasis akrual

yang utuh kedalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Hal ini dilakukan dengan melihat masalah yang ada secara menyeluruh dan menyelidiki tujuan sistem dan kriteria untuk berhasilnya sistem tersebut. Analisis akan ditunjukkan oleh respon sistem dengan tuntutan lingkungannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Keunggulan dan keterbatasan SIMDA Keuangan

1. Keunggulan yang dirasakan setelah dinas PPKAD menerapkan SIMDA Keuangan:

a. Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

- PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
- Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006,
- Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

b. Terintegrasi

Aplikasi SIMDA dapat dimplementasikan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, menggunakan teknologi multi user dan teknologi client/server, dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan

pertanggungjawaban keuangan baik dilaksanakan di SKPKD maupun di SKPD, sehingga mempunyai keuntungan :

- Pengendalian transaksi terjamin
- Efisien dalam melakukan penatausahaan, hanya membutuhkan satu kali input data transaksi sehingga menghemat waktu, tenaga dan biaya.
- Cepat, akurat dan efisien dalam menghasilkan informasi keuangan

c. Transfer of Knowledge

Dengan memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam hal:

- Penguasaan disiplin ilmu akuntansi dan audit,
- Penguasaan business process pengelolaan keuangan daerah, dan
- Pengalaman praktis pengelolaan keuangan daerah,
- Didukung dengan kantor Perwakilan BPKP yang dapat menjangkau seluruh pemerintah daerah, maka BPKP dapat membimbing dan mengasistensi pengelola keuangan daerah untuk mengimplementasi sistem pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan dan kebutuhan manajemen dengan menggunakan aplikasi SIMDA. Bimbingan dan asistensi tersebut merupakan proses transfer of knowledge dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM pemerintah daerah .

2. Keterbatasan yang dirasakan setelah dinas PPKAD menerapkan SIMDA Keuangan:

Dari segi pengolahan data keuangan

- a. Sering terjadinya kesulitan dalam pertukaran file ataupun import-eksport data, sering tidak keluar/tampil laporan atau report yang diinginkan user, tanggal dan kode rekening dalam laporan sering tidak keluar/tampil dalam laporan tersebut, sering terjadi perbedaan jumlah hasil rekapan antar laporan yang tentu saja dapat berakibat pada keterandalan laporan.
- b. Apabila terjadi kesalahan penginputan dalam laporan, user akan mengalami kesulitan melakukan perbaikan (rollback) karena disebabkan semua laporan berada dalam satu database, jadi apabila satu laporan di rollback otomatis akan mempengaruhi laporan yang lainnya.
- c. Sistem pengoperasian pengelolaan data keuangan SIMDA dinilai sangat rumit atau tidak *user friendly* yang tidak mengikuti perkembangan teknologi pemrograman yang sudah berfokus kepada kenyamanan penggunaan dari user.

Dari segi Keterbatasan Perangkat :

- a. Terdapat kesulitan memproteksi virus yang kurang familier dengan aplikasi simda
- b. Jaringan yang dimana sering terputusnya koneksi jaringan ketika user akan melakukan koneksi ke server SIMDA
- c. Database SIMDA, software SIMDA berbasis desktop dengan menggunakan jaringan Local Area Network yang dimana hanya kalangan internal pemerintah daerah saja yang dapat mengakses SIMDA, sehingga backup database untuk

SIMDA pun juga hanya bersifat internal yang menunjukkan lemahnya tingkat keamanan data.

Dari segi perawatan dan pemahaman *user* SIMDA Keuangan:

- a. SKPD masih menggantungkan diri kepada tim satuan tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Akibatnya apabila ada kerusakan-kerusakan teknis, sekalipun sangat sederhana, tidak bisa segera di atasi sendiri oleh para pegawai. Masalah-masalah yang ada pada penerapan SIMDA menunjukkan bahwa penerapan SIMDA masih memiliki banyak kelemahan yang menghambat proses penyusunan laporan keuangan, sehingga penerapan SIMDA dapat dikatakan belum sepenuhnya dapat membantu dalam penyusunan laporan keuangan.
- b. Kurangnya pemahaman *user* ataupun pengguna SIMDA Keuangan terhadap siklus laporan keuangan pada software SIMDA Keuangan. Sehingga pengguna SIMDA Keuangan pada umumnya hanya lebih memahami tahapan-tahapan pengoperasian SIMDA Keuangan sebagaimana yang diperoleh pada pelatihan SIMDA Keuangan tanpa memahami siklus laporan keuangan pada SIMDA Keuangan.

### **Pengendalian Internal**

#### **1. Pembangian kewenangan user**

Tujuan dari pengendalian aplikasi adalah untuk menjamin bahwa seluruh transaksi adalah valid, terotorisasi dan dicatat secara lengkap, akurat dan benar. Pengendalian internal dalam aplikasi SIMDA Keuangan

terutama dilakukan dengan pembagian tingkat kewenangan, meliputi: administrator, supervisor, dan operator. Administrator memiliki kewenangan pembuatan user dan otoritas user, setting aplikasi (parameter), posting anggaran, dan unposting jurnal. Supervisor memiliki kewenangan mengotorisasi input data, maupun penyesuaian/ koreksi. Operator hanya memiliki kewenangan untuk

menginput data dan melihat laporan.

2. Pengendalian menu berdasarkan Fungsi

Untuk menjamin validitas input data aplikasi SIMDA Keuangan secara terintegrasi mengatur pengendalian berdasarkan fungsi-fungsi: penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis diatas, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Penerapan SIMDA Keuangan di Dinas PPKAD Kabupaten Lahat ternyata sangat membantu proses pelaporan keuangan terbukti dari mulai proses penganggaran, perbendaharaan, dan akuntansi pelaporan yang semakin meminimalisir kesalahan dan efisien. Para pengguna hanya bertugas

memeriksa, memverifikasi, dan mengentri data. Semua jurnal, buku besar dan laporan otomatis dibuat oleh SIMDA Keuangan. Tapi walaupun begitu juga terdapat berbagai kendala transfer data .

- b. Pengendalian yang telah dilakukan oleh Dinas PPKAD sudah baik , karna telah terjadi pembagian otorisasi, usernams, dan password yang menghindari kesalahan wewenang pada SIMDA Keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, Daniel Kartika dan Suhardjo, Yohanes. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tual). *Jurnal STIE Semarang*. 5(3), 93-111
- Rizki, Luhur Nurmala. 2012. Penatausahaan Asset pemerintah Daerah Melalui Sistem Informasi manajemen Barang Daerah (SIMBADA) di kabupaten Malang. *Journal of Public Administration Research (JOPAR)*, Vol 1, No.1, hal. 91-99
- Nugraha, Harmadhani Adi dan Astuti, Yuli Widi. 2013. Analisis

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) dalam Pengolahan Data Keuangan pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Akuntansi Aktual*. 2(1), 25-33

- Agyei-Mensah, B. 2013. Adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) in Ghana and the Quality of Financial Statement Disclosures. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 3(2), 269-286

- Hardiawan, Revan, dkk., 2012. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

- Versi 2.1 di Bappeda Kabupaten Kepahiang (Studi Deskriptif Kualitatif). *The Manager Review: Jurnal Ilmiah Manajemen*. 13(1), 38-50
- Mohune, Cipmawati. 2013. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo). *Jurnal KIM Fakultas Ekonomi & Bisnis*. 1(1), 1-16
- A Hall, James, Tommie Singleton. 2009. *Information Technology Auditing and Assurance*. Salemba Empat : Jakarta
- A Hall, James. 2009. *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat : Jakarta
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Harhap, Sofyan Syari. 2007. *Teori Akuntansi (ed. revisi)*. PTR Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Raymond McLeod, Jr. dan George Schell. 2008. *Sistem Informasi Manajemen Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat
- Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Ikatan Akuntan Indonesia: Jakarta 2013
- Suhariyadi, Purwanto S.H. 2012. *Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern (ed. 2)*. Salemba Empat: Jakarta
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2014. *Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)*, <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Versi-2.1.bpkp>, diakses tanggal 18 Januari 2016
- Gambaran Umum Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual  
<http://keuda.kemendagri.go.id/asset/dataupload/paparan/paparan-modul-sapakrual/GAMBARAN-UMUM-MODUL-AKPEMDA-BSSAKRUAL.pdf>
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Gorontalo. 2010. *Modul Teknik Audit Berbantuan Komputer Untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Yang Disusun Dengan Aplikasi SIMDA*  
<https://www.slideshare.net/tedynurul/a142-p2-tabk-simda-bp>

